

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, A. Z. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ali, A. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Andrisman, T. 2007. *Hukum Pidana*. Lampung: Universitas Lampung.
- Atmasasmita, R. 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan LBH.
- Bagaskoro, L. R. 2023. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Chazawi, A. 2018. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Danil, E. 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: RajGrafindo Persada.
- Dimiyati, K. 2015. *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Djamali, R. A. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dr.Muhaimin, S. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Evi Hartanti, S. 2023. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitriani. 2019. *Tindak Pidana Khusus*. Medan: Enam Media.
- Hamzah, A. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Medan: Sofmedia.
- Hanafi, M. 2015. *Sistem pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, C. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Irawati, J. S. 2022. *Kejahatan Terhadap Subjek Hukum*. Malang: Media Nusa Creative.
- Kansil, C. S. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Magnar, B. M. 2017. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- Marpaung, L. 2008. *Asas-Teori-Praktek: Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatna. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, S. 2021. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukhlis, T. d. 2018. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Muladi. 1984. *Pidana dan Pemidanaan Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Praja, R. A. 1990. *Hukum Pidana dalam Yurisprudensi*. Bandung: Armico.
- Prakoso, D. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Bandung : Pioner Jaya.

- Prasetyo, T. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Priyanto, A. 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Rusianto, A. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konostensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Saile, M. S. 2009. *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: Restu Agung.
- Simanjuntak, A. 2020. *Refleksi tentang Delik Korupsi: Sebuah Kajian Historis dan Filosofis atas Rumusan Delik Korupsi Produk Legislasi dan Kodifikasi*. Depok: Rajawali Pers.
- Sunggono, B. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syahrani, R. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Utrecht, E. 1958. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta.
- Wiradipradja, E. S. 1989. *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*. Yogyakarta: Liberty.
- Yuherawan, M. A. 2021. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunara, E. 2012. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yurizal. 2017. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.

B. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan
- Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

C. Jurnal

- Abdul Fatah, N. S, 2017, Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, hlm. 5, 18 Januari 2024, *Diponegoro Law Journal*.
- Ahmad, A. &. 2020. Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. hlm. 785- 808, *Jurnal Konstitusi*.
- Alam, S. 2017. Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi dalam Praktek di Indonesia . , hlm. 160, 18 November 2023, *Jurnal Hukum Replik*.
- Arif, S. H. 2021. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, hlm. 57-58.
- Audi Helri Pondaag, Ollij Anneke Kereh, Friend Henry Anis. 2024. Kajian Yuridis Pengelolaan

- Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 41.
- Doodoh, I. 2013. Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. hlm. 97, Jakarta [7 November 2023](#), *Lex et Societatis*.
- Fadlian, A. 2020. Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. hlm. 15, Jakarta 24 Oktober 2023, *Jurnal Hukum POSITUM*.
- Fatkhurohman. 2017. Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. hlm. 10, Jakarta 12 Juni 2024, *Jurnal Konstitusi*.
- Kadir, Y. &. 2018. Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. hlm. 431, Jakarta [20 Juni 2023](#), *Jurnal IUS, Vol. VI, No. 3*.
- Kristanto, K. 2019. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara. hlm. 566, Jakarta tanggal 5 Juni 2024, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*.
- Lonna Yohanes Lengkong. 2019. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. hlm. 211-212, Jakarta 17 Juli 2024, *Jurnal to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*.
- Manihuruk., T. N. 2019. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kampar". hlm. 86, Jakarta [tanggal 20 Juni 2023](#), *Jurnal Gagasan Hukum, Vol.1 No.1*.
- Mario Julyano, d. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. hlm. 13, Jakarta 28 Oktober 2023, *Jurnal Crepido*.
- Nggilu, N. M. 2020. Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. hlm. 109-121, Jakarta 30 November 2023, *Lambung Mangkurat Law Journal*.
- Prakoso, T. S. 2014. Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korup. hlm. 26, Jakarta tanggal 18 Januari 2024, *Recidive Journal*.
- Samadi, Y. P. 2015. Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. hlm. 2, Jakarta 25 Juni 2024 *Lex Crimen*.
- Saputra, D. E. 2018. Implikasi Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. hlm. 2, Jakarta tanggal 5 Juni 2024, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 2.
- Senok, A. K. 2022. Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki. hlm. 42, Jakarta tanggal 22 November 2023, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
- Soselisa, R. F. 2015. Suatu Kajian Tentang Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi. hlm. 64, Jakarta 18 Januari 2024, *Lex Crimen*.
- Taufikqurrahman, M. 2021. Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. hlm. 121-122, Jakarta 20 Juni 2023, *Jurnal Rectum. Vol. 3, No. 1*.
- Triyanto, G. 2017. Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. hlm. 50, Jakarta 18 Januari 2024, *Jurnal Rechtsens*.

D. Internet

Maesaroh, M. S. (2021, Januari 10). Retrieved from <http://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana>